

ABSTRAK

PT.Pegadaian memberi kemudahan dalam proses pencairan kredit yang membuat masyarakat tertarik dalam menggadaikan barang, namun di dalam praktek setelah terjadi perjanjian kredit antara PT.Pegadaian dengan nasabah seringkali nasabah tidak bisa memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan maka nasabah mencoba mengalihkan hak penebusan barang gadai untuk meminimalisir kerugian. Namun nasabah banyak kurang mengerti tentang aturan peralihan hak kuasa dan dengan begitu saja memberikan surat bukti gadai sebagaimana surat bukti kredit merupakan alat untuk menebus barang gadai. Undang-undang mengatur peralihan hukum benda dan barang gadai merupakan jaminan dari hutang yang berbetuk benda bergerak maka sesuai pasal 1977 hal itu dapat di benar kan namun menjadi masalah jika asas bezitter dipakai oleh orang yang mempunyai itikad buruk. Untuk itu penelitian ini untuk menjawab pertanyaan Apakah Penebusan Barang Gadai Oleh Orang Yang Tidak Berhak Itu Dapat Dibenarkan dan Apakah Akibat Hukum Atas Penebusan Barang Gadai Oleh Orang Yang Tidak Berhak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative berbahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dianalisis menggunakan hukum perdata. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penebusan barang gadai oleh orang yang tidak berhak dapat dibenarkan sepanjang dirinya mempunyai surat kuasa atau kartu identitas yang tercantum pada surat bukti gadai. Akibat hukum atas penebusan barang gadai oleh orang yang tidak berhak dapat dibatalkan artinya sepanjang tidak ada yang menggugat maka tetaplah sah.

Kata kunci : Penebusan, Barang Gadai, Orang Tidak Berhak

ABSTRACT

The thesis entitled The Redemption of Pawn Items by Unqualified People is the result of observations to answer the question of whether the Redemption of Pawn Items by Unqualified Persons Is Justifiable and What are the Legal Effects of Redemption of Pawn Items by Unqualified Persons. This research is a normative legal research based on primary and secondary law that uses inductive logic to obtain conclusions specifically analyzed using civil law. The results of this study conclude that the redemption of pledged goods by an unauthorized person can be justified as long as he has a power of attorney or identity card listed on the credit proof. The legal consequences of the redemption of pledged goods by unauthorized persons can be canceled, meaning that as long as no one is suing, it is still legal.

Keywords: Redemption, Pawn Items, Non-entitled People

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMANPERSETUJUAN	Ii
HALAMAN PENGESAHAN	Iii
HALAMANPENYATAAN KEASLIAN	Iv
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR	Vi
UCAPAN TERIMA KSIH.....	Viii
ABSTRAK	Ix
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	Xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6
1.5. Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1.Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.7. Analisis Bahan Hukum.....	11
 BAB II ASPEK BAHAN HUKUM JAMINAN GADAI	 12
2.1. Pengertian Gadai.....	12
2.2.Subjek Dan Objek Gadai.....	16
2.3.Hak Dan Kewajiban Pemegang Gadai.....	24
2.4.Berakhirnya Perjanjian Gadai	28
 BAB III PENEBUSAN BARANG GADAI OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK DAN AKIBAT HUKUMNYA).....	 30
3.1. Penebusan Barang Gadai Oleh Orang Yang Tidak Berhak....	30
3.2.Akibat Hukum Atas Penebusan Barang Oleh Orang Yang Tidak Berhak.....	45
 BAB IV PENUTUP.....	 55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	 57
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	